

Apakah Literasi Keuangan Memengaruhi Kesejahteraan Rumah Tangga di Indonesia?

Fikri Brillianti^{α*}, Achmad Kautsar^β

* Email: fbrillianti@gmail.com

^{αβ} Universitas Pertamina, Jalan Teuku Nyak Arief, RtT.7/RW.8, Simprug, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12220

Riwayat artikel:

- Diterima 1 April 2020
- Direvisi 21 September 2020
- Disetujui 3 Oktober 2020
- Tersedia 2 November 2020

Abstract

This study uses household-level data derived from the 4th and 5th wave of the Indonesian Family Life Survey (ILFS). This study aims to discover the impact of financial literacy on households' welfare in Indonesia. We use a probit model estimation in this study. Households' welfare is calculated using the provincial level poverty line from the 2nd semester of 2014. The explanatory variables include households' knowledge on the official loan provider institutions, ownership of bank account, household heads' age and years of schooling, household size, and the number of employed household members. The first two variables represent financial literacy aspects. This study shows that knowledgeable households in the official loan provider institutions have a higher probability of 2.88 percent being prosperous than those who are not. Households with a bank account's possession also have a greater chance of being considered nonpoor than others who do not have it by 5.36 percent.

Keywords:

literasi keuangan; kesejahteraan; rumah tangga; IFLS

JEL Classification :

G53, I31

1. PENDAHULUAN

Literasi keuangan merupakan salah satu fokus pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pemerintah berpandangan bahwa melalui literasi keuangan maka stabilitas sistem keuangan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan secara inklusif dapat lebih mudah tercapai. Hal inilah yang kemudian mendorong Pemerintah Republik Indonesia membentuk Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) sejak tahun 2013 (OJK, 2017).

Skema yang disusun pemerintah melalui SNLKI telah berhasil meningkatkan literasi keuangan di Indonesia. Laporan OJK (2019) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan literasi keuangan di Indonesia pada tahun 2019 apabila dibandingkan dengan sebelumnya, yaitu mencapai 38,03 persen. Nilai tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya mencapai 29,7 persen dan pada tahun 2013, saat SNLKI baru diterapkan, yang hanya mencapai 21,84 persen (OJK, 2017). Peningkatan literasi keuangan di Indonesia tersebut bisa menjadi indikator bahwa semakin banyak masyarakat Indonesia yang memiliki pemahaman tentang keuangan. Sebagaimana tujuan pemerintah dalam menyelenggarakan SNLKI, peningkatan literasi keuangan masyarakat di Indonesia berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Menurut OJK (2017), literasi keuangan bukan hanya berkaitan dengan pengetahuan, kemampuan, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan saja, melainkan berkaitan juga dengan kebiasaan masyarakat terkait keuangan. Tingkat literasi keuangan yang dimiliki masyarakat juga mampu menopang pertumbuhan ekonomi suatu negara (OJK, 2016). Hal ini dikarenakan masyarakat yang terliterasi dengan baik pada keuangan akan lebih mudah memahami sektor keuangan yang kemudian akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang mendukung kesejahteraan mereka. Selain itu, masyarakat yang memiliki pemahaman pada keuangan juga akan mampu melindungi dirinya dari potensi kerugian di sektor keuangan (OJK, 2016). UNDP (2012) juga menyampaikan bahwa melalui literasi keuangan, inklusi keuangan (*financial inclusion*) yang menjadi target di berbagai negara dapat tercapai. Hal tersebut dikarenakan masyarakat yang terliterasi akan mengetahui bagaimana menggunakan uangnya dan tujuan dari kepemilikan produk dan jasa keuangan sehingga selanjutnya mencapai inklusi keuangan.

Sebelumnya, terdapat beberapa studi yang telah membahas mengenai hubungan antara literasi keuangan dengan kesejahteraan masyarakat. Jappelli & Padula (2011) telah melakukan penelitian mengenai hubungan literasi keuangan dengan kesejahteraan yang diukur melalui kekayaan suatu rumah tangga. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki hubungan yang positif dan kuat pada kekayaan. Hal tersebut dibuktikan melalui analisis *multiperiod* pada 11 negara di Eropa pada tahun 2003 (*wave 1*) dan 13 negara di Eropa pada tahun 2006 (*wave 2*). Hasil analisis pada *wave 1* menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan literasi keuangan sebesar 1 poin, kekayaan rumah tangga akan meningkat sebesar 9 persen. Sementara itu, pada *wave 2* menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan literasi keuangan sebesar 1 poin, kekayaan rumah tangga akan meningkat sebesar 11,2 persen. Lusardi & Mitchell (2014) dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa literasi keuangan perlu dimiliki oleh masyarakat. Simpulan tersebut diperoleh dari hasil analisis kualitatif pada 4 negara, yaitu Amerika Serikat, Jerman, Belanda, dan Swis. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa literasi keuangan berpotensi menjadi navigator yang baik bagi masyarakat, terutama dalam kondisi krisis ekonomi. Hal ini disebabkan oleh pengaruh literasi keuangan masyarakat terhadap keputusan masyarakat terkait pengaturan keuangannya. Gathergood (2012) juga membuktikan tentang hubungan literasi keuangan dengan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan menganalisis hubungan antara kemampuan mengontrol diri, literasi keuangan, dan utang berlebih (*over-indebtedness*). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa masyarakat yang memiliki tingkat literasi keuangan rendah (*poor literacy*) dan kemampuan

mengontrol diri yang lemah berdampak positif pada tingkat utang yang berlebih. Setiap terjadi peningkatan 1 tingkat pada literasi keuangan, kondisi utang berlebihan mengalami penurunan sebesar 8 persen. Di Indonesia, Lopus, Amidjono, & Grimes (2019) telah melakukan literasi keuangan yang didasarkan pada hasil *literature review* dan pengamatan dalam proyek literasi keuangan “*Youth Win through Economic Participation (YEP)*”. Berdasarkan penelitian tersebut, diperoleh simpulan bahwa metode pelatihan dalam YEP memiliki pengaruh positif pada literasi keuangan pesertanya. Pada penelitian tersebut disampaikan pula bahwa literasi keuangan mampu memperbaiki produktivitas pekerja, menurunkan tingkat absensi pegawai, dan memengaruhi kesuksesan dalam berbisnis.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, adanya literasi keuangan berpotensi memengaruhi kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Hal inilah yang kemudian mendorong analisis pengaruh literasi keuangan pada masyarakat di Indonesia, sebagaimana dilakukan dalam penelitian ini. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan data tingkat rumah tangga. Hasil analisis penelitian ini dapat melihat perilaku rumah tangga sehingga dapat dijadikan sebagai masukan bagi pembuat kebijakan. Selain itu, indikator kesejahteraan rumah tangga dalam penelitian ini diukur menggunakan standar garis kemiskinan tingkat provinsi sehingga analisis yang dihasilkan sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang beragam pada setiap provinsi di Indonesia.

Data tingkat rumah tangga yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari *Indonesia Family Life Survey wave 4* dan *wave 5* (IFLS-4 dan IFLS-5). Penelitian ini menggunakan data dari *Indonesia Family Life Survey* (IFLS) karena diklaim mampu merepresentasikan 83 persen populasi di Indonesia (Strauss et al. 2009). Literasi keuangan yang dianalisis dalam penelitian ini juga hanya berfokus pada pengetahuan masyarakat pada keberadaan lembaga keuangan resmi penyedia pinjaman dan kepemilikan akun tabungan dari rumah tangga. Selain itu, kesejahteraan yang akan dianalisis pada penelitian ini adalah yang didasarkan pada garis kemiskinan tingkat provinsi di Indonesia pada Semester 2 tahun 2014. Pemilihan garis kemiskinan pada tingkat provinsi tersebut didasarkan oleh kondisi garis kemiskinan masyarakat Indonesia yang beragam. Melalui skema analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan hasil analisis yang sesuai dengan kondisi nyata dan bisa menjadi pertimbangan bagi pemangku kebijakan di Indonesia dalam mengembangkan program literasi keuangan.

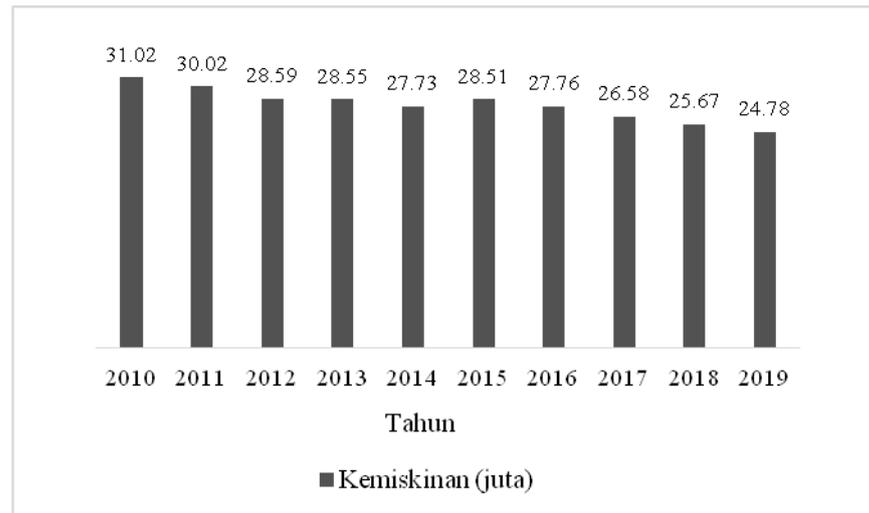
2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kesejahteraan Masyarakat Indonesia

Terkait dengan kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia, setiap tahunnya Badan Pusat Statistik (BPS) (2019b) telah mempublikasikan Laporan Indikator Kesejahteraan Rakyat yang menunjukkan perkembangan kesejahteraan rakyat di Indonesia. Menurut laporan tersebut, taraf kesejahteraan masyarakat Indonesia diukur melalui bidang kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, dan sosial lainnya. Di antara 8 indikator tersebut, kemiskinan menjadi salah satu bidang yang digunakan dalam menganalisis kesejahteraan rakyat di Indonesia. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi indikator kesejahteraan dalam penelitian ini.

Menurut Badan Pusat Statistik (2019b), tingkat kemiskinan di Indonesia cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Hingga tahun 2019, jumlah masyarakat yang tergolong miskin di Indonesia mencapai 25,14 juta. Angka tersebut telah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 25,67 juta jiwa. Apabila kemiskinan menjadi salah satu indikator yang digunakan Indonesia untuk mengukur kesejahteraan, penurunan tingkat kemiskinan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan di antara masyarakat Indonesia. Berikut merupakan perkembangan jumlah penduduk miskin di Indonesia.

GAMBAR- 1: Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia 2010-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik (2019c)

Pada gambar di atas terlihat penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia dari tahun ke tahun yang mengindikasikan kesejahteraan masyarakat di Indonesia cenderung meningkat. Akan tetapi, terdapat satu hal yang perlu diperhatikan dari penurunan jumlah penduduk miskin tersebut. Meskipun cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, penurunan pada jumlah penduduk miskin di Indonesia cenderung melambat. Perlambatan tersebut mengindikasikan jika taraf kesejahteraan masyarakat Indonesia melambat pula. Terkait perlambatan penurunan jumlah penduduk miskin tersebut, setiap tahunnya rata-rata hanya sebanyak 693 ribu masyarakat Indonesia yang berhasil keluar dari kategori miskin. Perlambatan jumlah penduduk yang keluar dari kemiskinan tersebut perlu menjadi perhatian supaya seluruh masyarakat Indonesia dapat mencapai kesejahteraannya.

Indonesia memiliki karakteristik kondisi geografis yang beragam sehingga tingkat kemiskinan di Indonesia beragam pula di setiap wilayah. Hingga tahun 2019, pedesaan memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Sebanyak 9,99 juta penduduk miskin di Indonesia tinggal di perkotaan dan sisanya sebanyak 15,15 juta jiwa tinggal di pedesaan (Badan Pusat Statistik, 2019b). Keberagaman kondisi kemiskinan tersebut menyebabkan kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia yang beragam pula.

Berkaitan dengan keberagaman kondisi kemiskinan dan kesejahteraan tersebut, penduduk miskin di daerah perkotaan lebih mudah keluar dari kategori miskin apabila dibandingkan dengan penduduk miskin di daerah pedesaan. Hal ini dapat diketahui dari indeks kedalaman kemiskinan perkotaan yang lebih rendah dibandingkan pedesaan. Pada tahun 2019, indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan mencapai 1,05 sementara pedesaan mencapai 2,18 (Badan Pusat Statistik, 2019b). Berdasarkan kondisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan di perkotaan lebih mudah dicapai apabila dibandingkan dengan di pedesaan.

2.2. Perkembangan Literasi Keuangan di Indonesia

Setelah diselenggarakan program SNLKI, literasi keuangan masyarakat di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, indeks literasi keuangan Indonesia sebesar 21,84 persen (OJK, 2017). Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 29,7 persen di tahun 2016 dan menjadi 38,03 persen pada tahun 2019 (OJK, 2019). Peningkatan yang terjadi pada literasi keuangan tersebut menunjukkan bahwa program SNLKI berdampak pada literasi masyarakat di Indonesia.

Indeks literasi di atas merupakan tingkat literasi dengan kategori *well literate*, yaitu indeks literasi yang diukur melalui pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki masyarakat tentang lembaga jasa keuangan dan produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat, risiko, hak, dan kewajiban atas produk dan jasa keuangan, serta diukur melalui keterampilan yang dimiliki masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa keuangan (OJK, 2013). Menurut OJK (2017), masyarakat yang tergolong *well literate* adalah masyarakat yang memiliki literasi keuangan bukan hanya berkaitan dengan pengetahuan, kemampuan, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan saja, melainkan berkaitan juga dengan kebiasaan masyarakat terkait keuangan. Sementara itu, jika masyarakat hanya memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan dan produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat, risiko, hak, dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan maka mereka tergolong *sufficient literate* (OJK, 2013). Pada tahun 2013 diketahui bahwa masyarakat Indonesia yang tergolong *sufficient literate* mencapai 75,69 persen. Di sisi lain, masyarakat yang hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk, dan jasa keuangan tergolong kategori *less literate* mencapai 2,06 persen. Kategori yang terakhir yaitu kategori *not literate*, yaitu masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan, dan tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan (OJK, 2013). Kategori *not literate* ini memiliki indeks sebesar 0,41 persen pada tahun 2013.

TABEL- 1: Indeks Literasi Masyarakat Tahun 2016

No	Provinsi	Indeks Literasi Keuangan (%)	No	Provinsi	Indeks Literasi Keuangan (%)
1	Aceh	32,7	18	Nusa Tenggara Barat	21,5
2	Sumatera Utara	31,3	19	Nusa Tenggara Timur	28,0
3	Sumatera Barat	27,3	20	Kalimantan Barat	30,5
4	Riau	29,5	21	Kalimantan Utara	26,5
5	Jambi	26,9	22	Kalimantan Tengah	26,2
6	Sumatera Selatan	31,3	23	Kalimantan Selatan	23,3
7	Lampung	26,9	24	Kalimantan Timur	30,5
8	Kep. Bangka Belitung	29,5	25	Sulawesi Selatan	28,4
9	Kep. Riau	37,1	26	Sulawesi Utara	28,7
10	Bengkulu	27,6	27	Sulawesi Barat	26,9
11	DKI Jakarta	40,0	28	Sulawesi Tengah	22,2
12	Jawa Barat	33,0	29	Sulawesi Tenggara	26,5
13	Jawa Tengah	33,5	30	Maluku	26,2
14	DI Yogyakarta	38,5	31	Maluku Utara	27,3
15	Jawa Timur	35,6	32	Gorontalo	23,3
16	Banten	38,2	33	Papua	22,2
17	Bali	37,5	34	Papua Barat	19,3

Sumber: OJK (2017)

Tingkat literasi keuangan masyarakat di Indonesia juga beragam, tergantung pada jenis kelamin dan lokasi tempat tinggalnya. Berdasarkan hasil laporan OJK (2019), pada tahun 2019 indeks literasi keuangan masyarakat perkotaan mencapai 41,41 persen, sementara pedesaan mencapai 34,53 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki literasi keuangan lebih banyak ditemukan di perkotaan apabila dibandingkan dengan di pedesaan.

Selain itu, masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki juga memiliki nilai indeks lebih tinggi dibandingkan perempuan, yaitu 39,94 persen pada laki laki dan 36,13 persen pada perempuan (OJK, 2019).

Setiap provinsi di Indonesia juga memiliki tingkat literasi yang berbeda-beda. Provinsi dengan tingkat literasi keuangan tertinggi pada tahun 2016 adalah DKI Jakarta dengan nilai indeks sebesar 40,0 persen. Sementara itu, rata-rata indeks literasi keuangan nasional adalah 29,7 persen. Provinsi dengan tingkat literasi keuangan terendah di Indonesia adalah Provinsi Papua Barat, yaitu sebesar 19,3 persen (OJK, 2017). Berikut merupakan daftar indeks literasi provinsi di Indonesia pada tahun 2016.

2.3. Garis Kemiskinan di Indonesia

Garis kemiskinan merupakan batasan yang akan menentukan apakah seorang individu termasuk kategori miskin atau tidak. Di Indonesia, standar garis kemiskinan dihitung oleh BPS yang didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) (Isdijoso, Suryahadi, & Akhmadi, 2016). Masyarakat yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan akan dikategorikan sebagai penduduk miskin, sementara jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya di atas garis kemiskinan termasuk pada kategori penduduk tidak miskin (Badan Pusat Statistik, 2019d).

Pada penelitian ini, garis kemiskinan digunakan sebagai indikator kesejahteraan. Masyarakat yang pengeluaran bulannya di atas garis kemiskinan termasuk kategori sejahtera, sementara yang berada di bawah garis kemiskinan termasuk kategori tidak sejahtera. Garis kemiskinan yang digunakan pada penelitian ini merupakan garis kemiskinan semester 2 tahun 2014 untuk tingkat provinsi dan hanya terdapat 24 provinsi yang digunakan. Jumlah provinsi tersebut ditentukan dari provinsi yang menjadi objek penelitian dari IFLS. Berikut merupakan garis kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini.

TABEL- 2: Garis Kemiskinan Provinsi Semester 2 Tahun 2014

No	Provinsi	Perkotaan/Urban	Perdesaan/Rural
1	Aceh	Rp396.939	Rp369.232
2	Sumatera Utara	Rp349.372	Rp312.493
3	Sumatera Barat	Rp390.862	Rp349.824
4	Riau	Rp386.606	Rp374.466
5	Jambi	Rp390.931	Rp302.162
6	Sumatera Selatan	Rp346.238	Rp285.791
7	Lampung	Rp350.024	Rp307.818
8	Kep. Bangka Belitung	Rp458.055	Rp481.226
9	Kep. Riau	Rp431.127	Rp399.063
10	DKI Jakarta	Rp459.560	-
11	Jawa Barat	Rp294.700	Rp285.076
12	Jawa Tengah	Rp286.014	Rp277.802
13	DI Yogyakarta	Rp333.561	Rp296.429
14	Jawa Timur	Rp293.391	Rp286.798
15	Banten	Rp324.902	Rp296.241
16	Bali	Rp316.235	Rp279.140
17	Nusa Tenggara Barat	Rp315.470	Rp285.205
18	Kalimantan Barat	Rp307.789	Rp294.044
19	Kalimantan Tengah	Rp316.683	Rp338.130
20	Kalimantan Selatan	Rp336.782	Rp313.954
21	Kalimantan Timur	Rp459.004	Rp420.427

22	Sulawesi Selatan	Rp246.416	Rp219.109
23	Sulawesi Barat	Rp245.959	Rp246.695
24	Papua Barat	Rp440.241	Rp423.701

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019)

3. METODE PENELITIAN

3.1. Deskripsi Data

Dalam melakukan analisis terhadap pengaruh literasi keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia, penelitian ini menggunakan data yang berasal dari IFLS 4 dan 5 (IFLS-4 dan IFLS-5). IFLS merupakan data longitudinal yang dikumpulkan RAND sejak tahun 1993. Survei dalam IFLS dilakukan secara rutin setiap tujuh tahun terhadap responden yang sama. Terkait dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, data IFLS-4 dikumpulkan pada tahun 2007 dan data IFLS-5 dikumpulkan pada tahun 2014 (Strauss et al., 2009). Meskipun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 2 periode yang berbeda, jenis data yang digunakan adalah *cross section* dengan data rumah tangga yang sama pada kedua periode tersebut. Penggunaan kedua periode IFLS tersebut dimaksudkan untuk melihat pengaruh dari literasi keuangan yang dimiliki masyarakat selama tujuh tahun kemudian, yaitu dimulai pada IFLS-4 dan dampaknya pada IFLS-5.

Penelitian ini menggunakan sebanyak 7.720 sampel rumah tangga di 13 provinsi di Indonesia. Indikator kesejahteraan pada penelitian ini didasarkan pada garis kemiskinan provinsi pada semester 2 tahun 2014 yang berasal dari Badan Pusat Statistik (2019). Garis kemiskinan pada semester 2 tahun 2014 tersebut dipilih dengan disesuaikan pada waktu penelitian dari IFLS-5. Pada standar garis kemiskinan ini, masyarakat yang pengeluaran bulannya berada di bawah garis kemiskinan tergolong miskin (tidak sejahtera), sementara apabila berada di atas garis kemiskinan tergolong tidak miskin (sejahtera).

3.2. Metode analisis pengaruh literasi keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia

Penelitian ini menggunakan model *probit* untuk mengestimasi pengaruh literasi keuangan pada kesejahteraan rumah tangga di Indonesia. Interpretasi dari model *probit* pada penelitian ini menggunakan *marginal effect*. Menurut Fernández-val (2009), koefisien indeks hasil regresi *probit* tidak dapat diinterpretasikan sebagai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Oleh karena itu, disarankan menggunakan metode *marginal effect* yang merupakan salah satu metode dalam menginterpretasi model *probit*.

Variabel dependen dari penelitian ini adalah *sejahtera*. Variabel tersebut diperoleh dari total pengeluaran bulanan pada suatu rumah tangga. Total pengeluaran tersebut meliputi pengeluaran untuk konsumsi pangan dan konsumsi nonpangan yang kemudian dibagi dengan total jumlah anggota keluarga untuk memperoleh total pengeluaran per kapita pada suatu rumah tangga. Sementara itu, variabel penjelas pada penelitian ini diantaranya pengetahuan lembaga keuangan, tabungan, usia kepala rumah tangga, lama pendidikan kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, dan jumlah anggota keluarga yang bekerja pada masing-masing rumah tangga. Berikut merupakan model yang digunakan dalam penelitian ini.

$$\begin{aligned} \text{Sejahtera}_i = & \beta_0 + \beta_1 \text{Pengetahuan lembaga keuangan}_i + \beta_2 \text{Tabungan}_i + \beta_3 \text{Usia}_i \\ & + \beta_4 \text{Lama pendidikan}_i + \beta_5 \text{Jumlah anggota keluarga}_i \\ & + \beta_6 \text{Pekerja}_i + \varepsilon_i \end{aligned}$$

Pada penelitian ini, variabel *Sejahtera_i* berbentuk *dummy* dengan *base group* tidak sejahtera. Rumah tangga yang termasuk kategori tidak sejahtera tersebut merupakan rumah tangga yang pengeluaran bulanan per kapitanya berada di bawah garis kemiskinan provinsi pada semester

2 tahun 2014, sementara rumah tangga yang berkategori sejahtera memiliki pengeluaran per bulan per kapita di atas garis kemiskinan provinsi. Selanjutnya, variabel **Pengetahuan lembaga keuangan_i** merupakan pengetahuan responden terhadap lembaga keuangan resmi yang memiliki layanan pinjaman. Variabel ini diperoleh dari hasil survei IFLS yang menanyakan tentang pengetahuan anggota keluarga pada tempat-tempat penyedia layanan peminjaman uang. Kategori lembaga keuangan resmi penyedia layanan peminjaman di sini, meliputi: bank swasta, koperasi, bank pemerintah, bank pertanian/SAPRODI, Pegadaian, dan lembaga keuangan nonbank. Variabel ini juga berbentuk *dummy* dengan *base group* responden yang belum memiliki pengetahuan tentang lembaga keuangan resmi penyedia layanan peminjaman uang. Variabel **Tabungan_i** menunjukkan kepemilikan suatu rumah tangga pada akun tabungan. Variabel ini berbentuk *dummy*, bernilai 1 jika terdapat anggota keluarga yang memiliki akun tabungan dan bernilai 0 jika tidak terdapat anggota keluarga yang memiliki akun tabungan. Variabel **Usia_i** merupakan usia dari kepala keluarga (tahun), sementara variabel **Lama pendidikan_i** merupakan variabel dari tingkat pendidikan kepala keluarga (tahun), **Jumlah anggota keluarga_i** merupakan ukuran atau jumlah anggota keluarga, dan **Pekerja_i** merupakan variabel yang menunjukkan jumlah anggota keluarga yang bekerja.

Pada penelitian ini, literasi keuangan dianalisis melalui pengetahuan masyarakat (anggota rumah tangga) terhadap lembaga keuangan resmi penyedia layanan peminjaman dan melalui kepemilikan tabungan dari responden pada IFLS-4. Sementara itu, variabel sejahtera didasarkan pada garis kemiskinan provinsi semester 2 tahun 2014, yaitu pada saat dilakukan survei IFLS-5. Selanjutnya, karakteristik rumah tangga diperoleh dari data IFLS-5, sesuai dengan waktu pada variabel sejahtera. Berikut merupakan deskripsi sampel dalam penelitian ini.

TABEL- 3: Deskripsi sampel penelitian

Karakteristik Rumah Tangga	Rata-Rata	Persentase
Pengetahuan Lembaga Keuangan		
Mengetahui		76,61
Belum mengetahui		23,39
Tabungan		
Memiliki akun tabungan		26,08
Tidak memiliki akun tabungan		73,92
Usia Kepala Keluarga	45,16	
Tingkat Pendidikan	9,31	
Jumlah Anggota Keluarga	3,68	
Pekerja	2,31	

Jumlah observasi: 7.720

Sumber: *Indonesia Family Life Survey*

Berikut merupakan daftar pertanyaan dari kuesioner IFLS-4 dan IFLS-5 yang digunakan dalam penelitian ini.

TABEL- 4: Daftar Kuesioner Penelitian

Variabel	Pertanyaan
Variabel Dependen	
Sejahtera	1. Selama satu minggu terakhir, berapa total pengeluaran/pembelian untuk [makanan pokok, daging/ikan, lauk-pauk lainnya, susu/telur, bumbu-bumbuan, minuman dan bahan minuman/bahan konsumsi lainnya]?
	2. Kira-kira berapa total nilai [makanan pokok, daging/ikan, lauk-pauk lainnya, susu/telur, bumbu-bumbuan, minuman dan bahan minuman/bahan konsumsi lainnya] yang dikonsumsi rumah tangga ini yang berasal dari hasil usaha sendiri atau diterima dari sumber lain selama satu minggu terakhir?

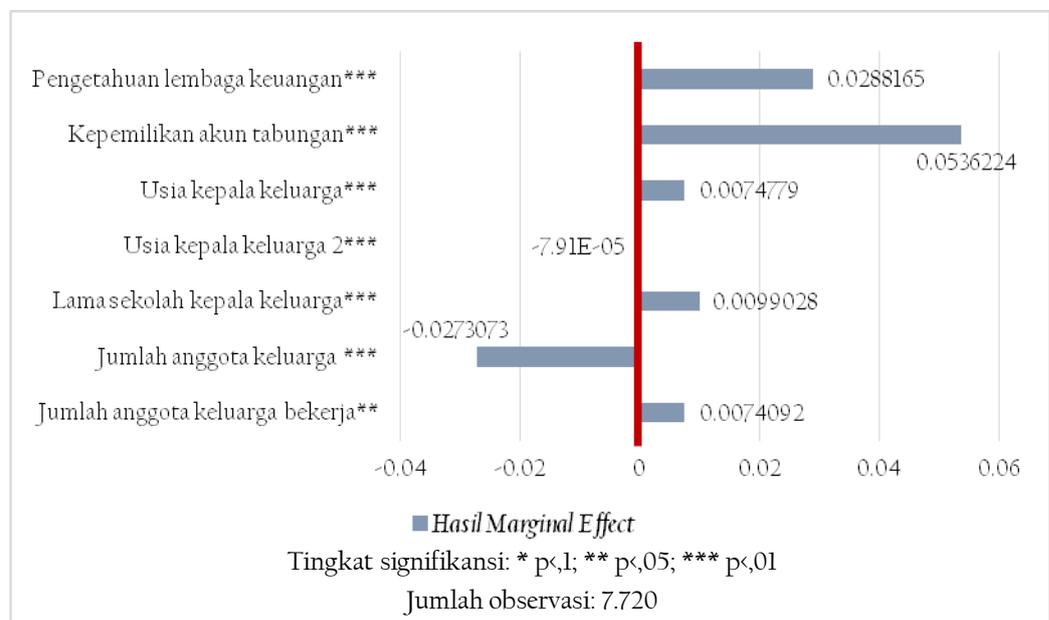
	3. Berapa pengeluaran untuk [jenis bahan bukan pangan] oleh semua anggota rumah tangga selama satu bulan terakhir?
Variabel Independen	
Pengetahuan lembaga keuangan	Apakah jenis tempat peminjaman yang Ibu/Bapak/Saudara, ART lain atau masyarakat sekitar ketahui?
Tabungan	Apakah Ibu/Bapak/Saudara atau ART yang lain memiliki tabungan?
Usia (kepala keluarga)	Umur sekarang ART (tahun)
Lama pendidikan (kepala keluarga)	Pendidikan tertinggi yang pernah diikuti ART?
Jumlah anggota kepala keluarga	Apakah [ART] masih hidup?
Pekerja	Apakah [ART] bekerja selama 12 terakhir (≥ 5 tahun)?

Sumber: Indonesia Family Life Survey

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menggunakan model *probit* menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh pada kesejahteraan rumah tangga di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari Gambar-2 berikut.

GAMBAR- 2: Hasil Marginal Effect Regresi Probit



Sumber: Data IFLS (diolah)

Pada Gambar-2 di atas, terlihat bahwa pengetahuan suatu rumah tangga terhadap lembaga keuangan resmi penyedia layanan peminjaman memiliki pengaruh yang positif pada kesejahteraannya. Suatu rumah tangga yang mengetahui tempat-tempat peminjaman pada lembaga keuangan resmi diestimasikan memiliki peluang 2,88 persen lebih besar untuk sejahtera dibandingkan yang tidak mengetahuinya. Hasil tersebut juga menunjukkan jika suatu rumah tangga yang memiliki pengetahuan tentang keberadaan lembaga resmi penyedia layanan peminjaman memiliki peluang untuk tidak miskin dibandingkan yang tidak mengetahuinya. Namun demikian, jika melihat selisih peluang yang tidak terlalu tinggi antara rumah tangga yang memiliki pengetahuan atas tempat peminjaman resmi dengan rumah tangga yang tidak memiliki pengetahuan maka masih diperlukan program pendukung lainnya terkait literasi keuangan yang lebih berdampak pada kesejahteraan rumah tangga di Indonesia.

Variabel literasi keuangan selanjutnya adalah berupa kepemilikan akun tabungan yang juga memiliki hubungan positif pada kesejahteraan di tingkat rumah tangga. Suatu rumah tangga yang memiliki akun tabungan diestimasikan memiliki peluang sebesar 5,36 persen lebih tinggi untuk sejahtera apabila dibandingkan rumah tangga yang tidak memiliki akun tabungan. Terkait hal tersebut, maka program-program yang mendukung aksesibilitas masyarakat untuk memiliki akun tabungan perlu ditingkatkan. Hasil ini juga mendukung salah satu program SNLKI yang diselenggarakan OJK (2017), yaitu tentang mengombinasikan edukasi keuangan dengan ketersediaan akses jasa keuangan dalam mendorong tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia (OJK, 2017). Hubungan positif antara literasi keuangan yang direpresentasikan dari pengetahuan tentang lembaga resmi keuangan dan kepemilikan akun rekening terhadap kesejahteraan rumah tangga tersebut selaras dengan hasil penelitian dari Chandran & Chandran (2018). Mereka menyatakan bahwa literasi keuangan berdampak signifikan dan positif pada intensitas investasi dan pengambilan keputusan keuangan seseorang. Kondisi tersebut disebabkan oleh kemampuan literasi keuangan yang memastikan seseorang terinformasi dengan baik pada bidang keuangan.

Berdasarkan hasil positif analisis pada 2 variabel yang mewakili literasi keuangan pada penelitian ini, yaitu pengetahuan rumah tangga tentang tempat peminjaman resmi dan kepemilikan rumah tangga atas akun tabungan, kedua variabel tersebut berpotensi mendukung kesejahteraan rumah tangga Indonesia yang didasarkan pada garis kemiskinan. Akan tetapi, masih diperlukan program atau kebijakan pendukung lainnya, mengingat nilai selisih peluang yang dihasilkan belum tinggi. Kondisi ini sesuai dengan definisi literasi keuangan menurut OJK (2017) yang menyampaikan bahwa literasi keuangan bukan hanya berkaitan dengan pengetahuan, kemampuan, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan saja, melainkan berkaitan juga dengan kebiasaan masyarakat terkait keuangan.

Salah satu program pendukung yang dapat dipertimbangkan supaya literasi keuangan dapat memberikan dampak yang lebih tinggi pada kesejahteraan rumah tangga di Indonesia adalah edukasi keuangan bagi rumah tangga di Indonesia. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Askar, Ouattara, & Zhang (2020) terhadap 8 negara di Afrika dan Asia, termasuk Indonesia terkait literasi keuangan. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa literasi keuangan, yang diteliti dari pemahaman masyarakat tentang konsep keuangan dan kemudian diukur dalam bentuk indeks, berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat konsumsi individu. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan pula bahwa pemahaman masyarakat pada konsep keuangan memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan yang didasarkan pada garis kemiskinan (yang didasarkan pada tingkat konsumsi). Oleh karena itu, perlu didukung program edukasi keuangan yang berpotensi meningkatkan pemahaman masyarakat atas konsep keuangan sehingga dampak pada kesejahteraan masyarakat lebih tinggi.

Hasil penelitian dari 2 variabel yang mewakili literatur keuangan di atas juga tidak terlepas dari kondisi lain, seperti karakteristik masing-masing rumah tangga. Beberapa karakteristik rumah tangga yang dianalisis pada penelitian ini, antara lain usia kepala keluarga, lama pendidikan kepala keluarga, jumlah anggota keluarga, dan jumlah anggota keluarga yang bekerja terhadap kesejahteraan rumah tangga di Indonesia. Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel karakteristik rumah tangga pada penelitian ini memiliki pengaruh pada kesejahteraannya. Pada hasil di atas terlihat pula jika usia kepala keluarga berpengaruh positif pada kesejahteraan rumah tangga. Ketika usia kepala keluarga bertambah satu tahun, rumah tangga tersebut memiliki peluang sejahtera sebesar 0,74 persen. Pada penelitian ini, usia memiliki hubungan kuadrat dengan variabel kesejahteraan, yaitu usia puncak kepala keluarga berhubungan positif pada kesejahteraan rumah tangga. Berdasarkan hubungan kuadrat tersebut, penambahan satu tahun usia kepala keluarga yang berdampak pada peluang kesejahteraan rumah tangga hanya berlangsung hingga usia kepala keluarga mencapai usia 47 tahun.

Selain itu, tingkat pendidikan dari kepala keluarga juga memiliki pengaruh yang positif. Setiap peningkatan lama sekolah kepala keluarga satu tahun, peluang keluarga tersebut menjadi sejahtera akan meningkat 0,99 persen. Selanjutnya, pada jumlah anggota keluarga, variabel karakteristik rumah tangga ini memiliki pengaruh yang negatif pada kesejahteraan. Setiap penambahan anggota keluarga sebanyak satu orang, peluang rumah tangga tersebut tidak sejahtera lebih besar sebesar 2,7 persen. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat sehingga pengeluaran per individu dalam keluarga akan semakin sedikit. Sementara itu, jika jumlah anggota keluarga yang bekerja bertambah maka peluangnya untuk sejahtera meningkat 0,74 persen.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian ini, literasi keuangan memiliki pengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Individu yang memiliki pengetahuan tempat peminjaman memiliki peluang untuk lebih sejahtera apabila dibandingkan dengan individu yang tidak memiliki pengetahuan, walaupun peluang untuk menjadi lebih sejahtera diprediksi sebesar 2,88 persen. Selain itu, literasi keuangan pada masyarakat yang memiliki akun tabungan juga rata-rata memiliki peluang sebesar 5,36 persen lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang tidak memiliki akun tabungan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa masih diperlukan program pendukung lainnya supaya pengaruh literasi keuangan terhadap kesejahteraan lebih tinggi.

Melalui penelitian ini, terdapat 2 rekomendasi agar literasi keuangan mampu memberikan dampak yang lebih tinggi pada kesejahteraan rumah tangga di Indonesia. Pertama, tentang perlunya program pendukung yang mampu meningkatkan kualitas literasi keuangan masyarakat. Peningkatan kualitas literasi keuangan salah satunya dapat dilakukan melalui edukasi keuangan yang berfokus pada peningkatan pemahaman masyarakat tentang konsep keuangan. Pemahaman tentang konsep keuangan memiliki hubungan yang positif dan signifikan pada tingkat konsumsi masyarakat yang merupakan indikator garis kemiskinan. Kedua, pemerintah dapat bekerja sama dengan bank-bank BUMN untuk merealisasikan program edukasi mengenai pentingnya literasi keuangan secara menyeluruh, khususnya untuk masyarakat di daerah pedesaan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Askar, M. W., Ouattara, B., & Zhang, Y. (2020). Financial literacy and poverty reduction. *Asian Development Bank Institute*, (1097). Diambil dari <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/574816/adbi-wp1097.pdf>
- Badan Pusat Statistik. (2019a). Data garis kemiskinan per propinsi. Diambil dari <https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/01/18/1120/garis-kemiskinan-menurut-provinsi-2013---2019.html>
- Badan Pusat Statistik. (2019b). Indikator kesejahteraan rakyat. Diambil dari <https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbfvefe=MjdkNzhkNDliYzZhYTIyYmQzNjcyYjU5&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3BIYmxpY2F0aW9uLzIwMTkvMTEvMjgvMjdkNzhkNDliYzZhYTIyYmQzNjcyYjU5L2luZGlrYXRvcilrZXNlamFodGVyYWVwLXJha3lhdC0yMDE5Lmh0bWw%3D&etwoadfnua>
- Badan Pusat Statistik. (2019c). Jumlah Penduduk Miskin 2007-2019. Diambil dari <https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/01/18/1119/jumlah-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007-2019.html>
- Badan Pusat Statistik. (2019d). Konsep kemiskinan dan ketimpangan. Diambil dari <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab1>
- Chandran, S., & Chandran, R. (2018). Effect Of Financial Literacy On Personal Financial Management Of IT Employees In Kerala, 7(8), 67-74.
- Fernández-val, I. (2009). Fixed effects estimation of structural parameters and marginal effects in panel probit models. *Journal of Econometrics*, 150(1), 71-85. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2009.02.007>
- Gathergood, J. (2012). Self-control, financial literacy and consumer over-indebtedness. *Journal of Economic Psychology*, 33(3), 590-602. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2011.11.006>
- Isdijoso, W., Suryahadi, A., & Akhmadi. (2016). Penetapan kriteria dan variabel pendataan penduduk miskin yang komprehensif dalam rangka perlindungan penduduk miskin di kabupaten/kota. *The SMERU Research Institute*, 1-16. <https://doi.org/10.1109/CAIDCD.2009.5374873>
- Jappelli, T., & Padula, M. (2011). Investment in Financial Literacy and Saving Decisions, (january), 1-36. <https://doi.org/10.1017/S1474747214000377>
- Lopus, J. S., Amidjono, D. S., & Grimes, P. W. (2019). Improving financial literacy of the poor and vulnerable in Indonesia: An empirical analysis. *International Review of Economics Education*, 32(February), 100168. <https://doi.org/10.1016/j.iree.2019.100168>
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5-44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>
- OJK. (2013). Literasi Keuangan. Diambil dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Literasi-Keuangan.aspx>
- OJK. (2016). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016*. Diambil dari https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/Document/buku_statistik_2016.pdf
- OJK. (2017). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017). *Ojk*, 1-99. Diambil dari [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-\(Revisit-2017\)-/SNLKI\(Revisit2017\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-(Revisit-2017)-/SNLKI(Revisit2017).pdf)
- OJK. (2019). SP 58/dhms/ojk/xi/2019; Survei Literasi Keuangan 2019, (November), 29600000. Diambil dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran->

pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Survei-OJK-2019-Indeks-Literasi-Dan-Inklusi-Keuangan-Meningkat/SP - SURVEI OJK 2019 INDEKS LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN MENINGKAT.pdf

Strauss, J., Witoelar, F., Sikoki, B., & Wattie, A. M. (2009). User's Guide for the Indonesia Family Life Survey, Wave 4. *RAND Labour and Population Working Paper, WR-675/2-N*(April 2009), i-169. Diambil dari <http://catalog.ihsn.org/index.php/catalog/2370/download/37393>

UNDP. (2012). *Financial Literacy as A Tool for Financial Inclusion and Client Protection*. Diambil dari <https://www.in.undp.org/content/india/en/home/library/poverty/financial-literacy-as-a-tool-for-financial-inclusion-and-client-.html>